

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi. Kalimantan Selatan memiliki total luas wilayah mencapai 38.744,00 km² yang terdiri dari 11 kabupaten, 2 kota, 153 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.864 desa dengan total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 3.930.251 jiwa menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.

Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta dan pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai sehingga dijuluki sebagai “Kota Seribu Sungai”. Terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah dengan Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut jawa sehingga berpengaruh pada drainase kota dan memberikan ciri khas terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu sarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Pelabuhan Alalak merupakan salah satu pelabuhan yang aktif beroperasi di Kota Banjarmasin. Berada pada tepian Sungai Barito yang membelah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala membuat angkutan sungai di Pelabuhan Alalak selalu ramai penumpang dikarenakan jarak yang lebih efektif jika menggunakan angkutan sungai dibandingkan jika harus melalui jalan darat yang memutar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas daratan pelabuhan terbagi menjadi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok daratan antara lain terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, *gangway*, perkantoran, fasilitas bunker,

instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, akses jalan dan/atau jalur kereta api, fasilitas pemadam kebakaran serta tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

Kondisi *existing* fasilitas pokok daratan yang terdapat pada Pelabuhan Alalak saat ini masih kurang memadai seperti tidak tersedianya lapangan parkir siap muat, penempatan fasilitas loket yang tidak sesuai serta fasilitas pemadam kebakaran yang tidak tersedia mengakibatkan kurang optimalnya fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Alalak.

Penempatan fasilitas loket yang tidak sesuai mengakibatkan penjualan tiket dilakukan diatas jembatan *trestle* serta tidak tersedianya lapangan parkir siap muat pada Pelabuhan Alalak mengakibatkan sirkulasi arus kendaraan tidak teratur sehingga terjadi penumpukan kendaraan di atas jembatan *trestle*.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Banjarmasin (2021)

Gambar 1.1 Penempatan Loket Yang Tidak Sesuai



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Banjarmasin (2021)

Gambar 1.2 Penjualan Tiket di Jembatan *Trestle*



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Banjarmasin (2021)

Gambar 1.3 Kondisi Naik Dan Turun Kendaraan

Tidak tersedianya fasilitas pemadam kebakaran berupa alat pemadam api ringan yang dapat digunakan pada saat terjadi kebakaran kecil menyebabkan kurang optimalnya fasilitas yang terdapat pada Pelabuhan Alalak.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Banjarmasin (2021)

Gambar 1.4 Tidak Tersedianya Fasilitas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul : **“EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN SERTA SIRKULASI ARUS KENDARAAN PADA PELABUHAN ALALAK KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin saat ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan?
2. Bagaimana sirkulasi arus kendaraan di Pelabuhan Alalak yang sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Alalak ialah :

1. Mengetahui kesesuaian fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
2. Mengetahui pola arus kendaraan pada Pelabuhan Alalak yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

1.3.2 Manfaat

Terdapat manfaat secara teoritis dan praktis dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Taruna
Pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama masa pendidikan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan
Memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai fasilitas pokok daratan serta sirkulasi arus kendaraan pada Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin.
3. Bagi Instansi Pemerintahan
Sebagai acuan untuk memperbaiki ketersediaan fasilitas pokok daratan serta sirkulasi arus kendaraan di Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin guna meningkatkan kenyamanan penumpang.

1.3 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya

pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu :

- 1) Lokasi yang diteliti adalah Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Hal yang diteliti adalah fasilitas pokok daratan serta sirkulasi arus kendaraan (pola arus kendaraan) pada Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Evaluasi fasilitas pokok daratan meliputi lapangan parkir siap muat, fasilitas loket dan fasilitas pemadam kebakaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan serta sirkulasi arus kendaraan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.